

BAB IV

PENINGKATAN KONFLIK INTERKOMUNAL SETELAH MISI PERDAMAIAN UNAMID 2020-2022

4.1 Berakhirnya Misi Penjagaan Perdamaian UNAMID

Peluncuran misi penjagaan perdamaian yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sejak tahun 2007 yang bernama *African Union-United Nations Hybrid Operations in Darfur* (UNAMID) merupakan sebuah operasi hibrida gabungan antara Uni Afrika dan PBB. Operasi ini dibentuk atas dasar kegagalan *African Union Mission in Sudan* dalam mengatasi konflik yang terjadi di Darfur (Luqman & J., 2014). Selain itu, operasi ini juga menjadi operasi hibrida pertama dalam sejarah yang dilakukan oleh PBB. Setelah melakukan operasinya selama 9 tahun, UNAMID mulai merancang strategi keluarnya dari Sudan. Perancangan strategi keluar ini telah direncanakan sejak tahun 2014, namun baru memiliki resolusi pada tahun 2017 berdasarkan UNSC Resolutions 2363 dan 2429 pada tahun 2018 (Forti, 2019). Perancangan ini dicetuskan sejalan dengan proses transisi UNAMID yang dinilai telah menjalankan mandatnya di Darfur. Namun, permasalahan baru dimulai ketika Sudan mengalami revolusi di tahun 2019 yang ditandai dengan jatuhnya pemerintahan Omar Al-Bashir. Proses pergantian pemerintahan Sudan menjadi demokratik ini menimbulkan kompleksitas yang membuat UNAMID harus mengubah pendekatannya dalam menangani konflik kemanusiaan yang terjadi di Sudan.

Seiring dengan tugas yang dilakukan oleh UNAMID, kunjunglah masa di mana UNAMID harus melakukan pembuatan strategi untuk menyelesaikan misinya dan menarik diri sepenuhnya dari Sudan. Pembuatan konsep strategi untuk keluar dari Sudan ini merupakan hal kompleks yang harus dihadapi oleh komunitas internasional melihat transisi tersebut sebagai acuan untuk misi penjagaan perdamaian ke depannya. Pembentukan strategi ini dilakukan karena Dewan Keamanan PBB menilai keadaan situasi keamanan di Darfur telah meningkat. Keluarnya UNAMID dari Sudan ini dilakukan secara bertahap karena

memperhitungkan banyaknya aspek dan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi ketika strategi ini dilakukan. Pada tahun 2017, UNAMID melakukan fase pertama dengan melakukan penarikan personel militer sebesar 44% dan komponen dari kepolisian sebanyak 30% (Sudan Tribune, 2019). Dua fase yang diadopsi oleh UNAMID ini disebut dengan *two-pronged approach* yang memiliki fokus untuk melakukan penjagaan perdamaian di daerah Jebel Marra dan melakukan stabilisasi serta pengimplementasian pembinaan perdamaian di Darfur dengan menggunakan konsep *whole-of-system* (UNSC, 2021).

Penggunaan pendekatan dua arah untuk melakukan penarikan UNAMID dari Sudan merupakan salah satu konsep yang digunakan untuk menggabungkan pembangunan perdamaian atau langkah-langkah untuk stabilisasi demi beradaptasi dengan kebutuhan penduduk di Darfur. Dalam penelitian Forti (2019), menyorot empat kunci utama dalam proses transisi penarikan UNAMID. Pertama, penarikan dan transisi ini dimulai sebelum banyak indikator inti keberhasilan misi tercapai, selagi konflik terus berlanjut, tidak ada perjanjian perdamaian yang diterapkan. Selain itu, pemerintahan Sudan juga tidak terlibat dalam perancangan strategi transisi ini. Kedua, transisi ini memiliki kerangka waktu yang sangat singkat. Ketiga, konsep yang digunakan menggambarkan bahwa UNSC dapat mengintegrasikan upaya pembinaan perdamaian menjadi sebuah transisi. Keempat, pembuatan peringatan mengenai batas waktu pada Juni dan Desember 2020 akan dipenuhi jika tidak terdapat perubahan signifikan terhadap situasi keamanan di Darfur dan indikator kunci yang lainnya terpenuhi (Forti, 2019). Berdasarkan penyorotan ini, strategi penarikan UNAMID dari Sudan mengalami proses yang sangat kompleks menilai banyaknya adaptasi lanjutan yang harus dilakukan terhadap perubahan situasi yang ada di lapangan.

Mengenai pengalihan fokus yang diterapkan oleh UNAMID menjelang penarikannya dari Sudan dimulai dari tahun 2018, UNAMID melakukan kerja sama dengan UNCT (United Nations Country Team) yang memiliki basis di Khartoum untuk bekerja dalam area yang berbeda. UNAMID memiliki fokus pada daerah Darfur, sedangkan UNCT memiliki fokus terhadap Sudan. Melihat kerja sama ini, UNAMID memerlukan penyelarasan kerja dengan UNCT agar misi mereka dapat tercapai (Forti, 2019). Transisi ini juga kerap mengalami permasalahan-

permasalahan yang memiliki situasi serupa dengan proses transisi MINUSTAH atau *United Nations Stabilization Mission in Haiti*. Dalam penelitian yang ditulis oleh Namie Di Razza (2018) yang menyebutkan bahwa proses transisi misi perdamaian tersebut mengalami permasalahan terkait dengan ketidakstabilan pemerintahan yang tengah berada dalam proses transisi. Dalam penelitiannya, Di Razza juga menyebutkan bahwa konsultasi yang dilakukan terhadap pemerintahan memiliki keterbatasan dikarenakan ketidakpastian dari proses politik yang sedang berlangsung (Razza, 2018).

Ketidakpastian dari proses politik tersebut tercermin dalam pemerintahan Sudan yang sedang dalam masa transisi dari jatuhnya pemerintahan Omar Al-Bashir. Hal ini yang akan mengakibatkan beberapa dampak bagi UNAMID itu sendiri dalam proses transisi penarikan misi perdamaian mereka. Di Razza memberikan perspektif mengenai MINUSTAH yang dinilai melakukan proses transisi secara “terburu-buru dan kacau” meskipun memiliki banyak waktu untuk melakukan persiapan. Titik frustrasi proses transisi tersebut juga terletak pada sisi penarikan komponen militer dan polisi dengan jumlah yang spesifik dan harus ditarik pada tanggal tertentu, selain itu juga terletak pada sisi sipil mengenai likuidasi aset material dan pengelolaan sumber daya manusia (Razza, 2018). Melihat dari perspektif ini mengenai penarikan UNAMID, dapat dipastikan bahwa sumber-sumber permasalahan yang muncul tidak hanya berasal dari ketidakstabilan pemerintahan Sudan pada saat transisi, melainkan juga bagaimana adaptasi yang harus dilakukan ketika beberapa komponen dari misi perdamaian tersebut harus ditarik dengan jangka waktu tertentu, serta bagaimana penguatan struktur dari UNAMID itu sendiri agar menghasilkan setidaknya *Peace Agreement* yang akan memberikan dampak positif terhadap masyarakat di Darfur.

Tidak hanya permasalahan secara struktural, UNAMID juga harus menghadapi permasalahan yang muncul dari masyarakat. Pada dasarnya, masyarakat Darfur memiliki kekhawatiran terhadap kepergian UNAMID dari Sudan. Hal ini dapat terlihat dari demonstrasi yang dilakukan di beberapa kamp yang ada di Darfur. Seperti contohnya Kamp Kalma yang terletak di Nyala, Darfur Selatan. Masyarakat yang mengungsi di kamp tersebut melakukan protes terhadap penarikan UNAMID dari Sudan. Salah satu pemimpin kamp tersebut menyebutkan

bahwa “*protection of the displaced can not be entrusted to those who killed them*” (Dabanga Sudan, 2020). Ketidakpercayaan masyarakat Darfur terhadap pemerintahannya sendiri berangkat dari perilaku beberapa pihak selama masa pemerintahan Omar Al-Bashir yang dinilai telah menyengsarakan masyarakat Sudan. Terkait dengan pernyataan pemimpin di kamp tersebut, merujuk kepada tindakan represif dari *Rapid Support Forces* (RSF) yang beroperasi di bawah kepemimpinan Al-Bashir. RSF sendiri memiliki latar belakang yang kurang baik di mata masyarakat. RSF merupakan satuan paramiliter yang terdiri dari milisi Janjaweed, sebagai salah satu milisi yang memerangi pemberontak pada konflik yang terjadi di Darfur (Ismail, 2019). RSF juga bertugas sebagai mekanisme satuan pemeriksaan kudeta di bawah pimpinan Al-Bashir yang telah diberikan status *regular force* pada tahun 2015 (Al Jazeera, 2019).

Gambar 4.1.1 Demonstrasi Warga Sudan di depan Kantor Pusat Militer di Khartoum tahun 2019



Sumber: (Hamid, 2019)

Salah satu konflik lanjutan yang paling membekas di mata komunitas internasional adalah Pembantaian Khartoum atau *Khartoum Massacre* yang terjadi pada 3 Juni 2019, merupakan salah satu tragedi kemanusiaan yang dialami Darfur untuk kesekian kalinya. Kejadian ini pada awalnya diawali dengan gerakan demonstrasi yang dimulai sejak tahun 2018, pada dasarnya, penduduk Sudan melakukan demonstrasi yang diakibatkan oleh inflasi, kenaikan harga BBM dan pangan serta keinginan mereka untuk Omar Al-Bashir turun dari kepemimpinannya. Pembantaian ini dilakukan oleh pasukan keamanan Sudan terhadap demonstran pro-demokrasi yang hadir pada demonstrasi saat itu. Demonstrasi ini terjadi di depan kantor pusat tentara Sudan yang berada pada daerah bernama “Al-Qiyada”. Setelah turunnya Omar Al-Bashir dari kekuasaan pada tanggal 11 April 2019, Jenderal Abdel Fattah Al-Burhan mengambil alih kekuasaan sebagai pemimpin *Transitional Military Council* atau dewan militer transisi bersama dengan Jenderal Mohamed “Hemedti” Hamdan Dagalo sebagai deputinya (Ficke, 2020). Jenderal Hemedti merupakan sosok yang memimpin RFS yang dianggap bertanggung jawab atas Pembantaian Khartoum pada Juni 2019 tersebut. Hal ini dikarenakan pada saat itu, RSF mendominasi situasi keamanan di Sudan dan menurut beberapa sumber dan saksi yang hadir pada saat demonstrasi tersebut mengungkapkan bahwa mereka melihat tentara dengan seragam RSF yang melakukan penganiayaan terhadap demonstran sehingga menyebabkan kematian.

Kejadian tersebut merupakan salah satu faktor yang menjadikan masyarakat Darfur tidak percaya terhadap pasukan paramiliter RSF. Dengan kepergian UNAMID dari Sudan, pemerintahan Sudan akan mengambil alih tugas dari UNAMID seperti mendukung proses perdamaian, menjaga rakyat sipil, termasuk menyediakan fasilitas pengiriman bagi dukungan kemanusiaan dan mendukung mediasi konflik interkomunal (Sudan In The News, 2021). Melihat keadaan yang terjadi pada saat itu, penarikan UNAMID akan menjadi semakin kompleks dilihat dari bagaimana keterbatasan kapasitas pemerintahan Sudan dalam membendung kekerasan yang terjadi di Darfur. Meskipun RSF merupakan bagian dari pasukan keamanan pemerintahan Sudan, mereka telah menunjukkan pola kekerasan yang berbeda dari polisi dan militer Sudan. Lebih dari sebagian peristiwa ataupun kegiatan yang melibatkan RSF dapat dikatakan sebagai contoh dari kekerasan

terhadap warga sipil (ACLED, 2019). Hal ini didukung dengan data yang dikeluarkan oleh BBC berdasarkan informasi yang didapat dari pengamat ahli Sudan yaitu Alex De Waal mengenai *Khartoum Massacre* yang mengakibatkan setidaknya 120 orang menjadi korban meninggal dan banyak yang jasadnya dibuang ke Sungai Nil (BBC, 2019).

Sejak tahun 2018 berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2429 (2018), UNAMID telah mulai melakukan penutupan sepuluh *Team Sites* di seluruh Darfur sebagai bagian dari proses rekonfigurasi. Dua di antaranya yaitu *Community Policing Centre (CPC)* dan *El Sereif Team Sites* telah diserahkan kepada pemerintahan Sudan pada tanggal 8 dan 4 Oktober 2018 (UN Peacekeeping, 2018). Namun, seiring dengan berjalannya waktu dan beberapa kejadian seperti *Khartoum Massacre*, UNAMID memutuskan untuk melakukan penangguhan terhadap penyerahan kamp di bawah naungan UNAMID kepada pemerintahan Sudan. Hal ini diawali ketika ketua dari *Transition Military Council* yaitu Abdel Fattah Al-Burhan mengeluarkan surat keputusan yang ditujukan kepada gubernur-gubernur di Dafur untuk menyerahkan kamp UNAMID kepada RSF (Sudan Tribune, 2019). Hal ini menimbulkan reaksi dari PBB yang mengharuskan mereka menanggukkan proses penyerahan kamp sampai keputusan tersebut dibatalkan. Kepala Penjaga Perdamaian PBB, Jean-Pierre Lacroix, juga sempat menuturkan bahwa penjagaan perdamaian ‘bukan lagi sebagai alat yang tepat’ di Sudan dan UNAMID juga perlu melakukan penyesuaian terhadap posisinya di Sudan dengan tepat (Farooq, 2019).

Pada tahun 2020, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi 2559 (2020) untuk mengakhiri mandat dari UNAMID pada tanggal 31 Desember 2021 (S/RES/2559, 2020). Proses keluarnya UNAMID dari Sudan memerlukan beberapa tahapan, dimulai dari penarikan personil militer maupun dari pihak kepolisian, likuidasi aset, serta penyerahan kamp pengungsi kepada pemerintahan Sudan. Selain itu, dalam resolusi tersebut juga terdapat permintaan terhadap pemerintahan Sudan untuk segera melakukan implementasi *National Plan for Civilian Protection* yang memiliki tujuan untuk melindungi masyarakat sipil di Darfur dan menggarisbawahi bahwa perlunya membangun kepercayaan masyarakat lokal terhadap kemampuan lembaga negara hukum dalam memberikan keadilan, memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat yang rentan seperti para

pengungsi, perempuan, anak-anak muda, dan kelompok lainnya yang terpinggirkan. Menariknya, dalam mandat ini menegaskan bahwa penyerahan kamp dan aset lainnya tidak akan digunakan, baik oleh UNITAMS maupun *United Nations Country Team Partners* (UNCT).

Salah satu hal yang dapat dipastikan dari penarikan pasukan perdamaian PBB adalah warisannya. Dalam konteks ini, kekosongan kekuasaan merupakan hal yang menjadi sorotan. Dengan situasi keamanan yang masih belum terjamin, penarikan UNAMID akan menciptakan kondisi situasi keamanan yang lebih buruk lagi. Hal ini terlihat ketika UNAMID menjalankan proses likuidasi aset-asetnya, tidak sedikit dari aset UNAMID yang menjadi bahan jorok oleh para milisi yang seharusnya diserahkan kepada pihak yang berwenang (Kleinfeld & Amin, 2021). Sebagai operasi pemeliharaan perdamaian hibrida pertama, permasalahan tersebut menjadikannya sebagai tantangan yang tidak terduga. Permasalahan menjadi lebih kompleks ketika UNAMID menginginkan beberapa asetnya untuk diserahkan kepada misi perdamaian yang lain, sementara itu pemerintahan Sudan menginginkan semua aset yang dimiliki UNAMID mulai dari komputer, kendaraan, generator hingga AC. Beberapa fasilitas yang telah diserahkan kepada pemerintahan Sudan juga telah dijarah dengan bukti yang mengarah kepada keterlibatan pasukan 'RSF'.

Dengan melihat keluarnya UNAMID dari Sudan dan sebagai upaya dalam membantu pemerintahan Sudan dalam merekonstruksi stabilitas negaranya, Dewan Keamanan PBB mengajukan Resolusi 2524 (2020) untuk membentuk *United Nations Integrated Transition Assistance Mission in Sudan* (UNITAMS) dengan periode selama 12 bulan. Dalam resolusi ini juga disebutkan bahwa pembentukan misi bantuan politik ini memiliki empat poin penting, yaitu: Pertama, membantu transisi politik, membantu menuju pemerintahan yang lebih demokratis dalam perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia, dan perdamaian berkelanjutan. Kedua, membantu proses perdamaian dan implementasi dari kesepakatan perdamaian di masa yang akan datang. Ketiga, membantu pembinaan perdamaian, perlindungan rakyat sipil dan aturan hukum. Keempat, mendukung mobilisasi bantuan ekonomi dan pembangunan serta koordinasi dalam bantuan kemanusiaan (S/RES/2524, 2020). UNITAMS ini dibentuk dalam rangka menggantikan

UNAMID dan melanjutkan perencanaan serta pengelolaan transisi yang sesuai dengan kebijakan secara bertahap. Serta agar terciptanya mekanisme koordinasi dalam menentukan modalitas dan penentuan waktu pengalihan tanggung jawab bagi kedua misi tersebut.

Dengan berakhirnya masa kerja dari UNAMID yang meninggalkan masalah-masalah yang belum terselesaikan baik secara struktural maupun dari dalam masyarakat itu sendiri, ditambah dengan ketidakpastian proses politik yang sedang berlangsung di Sudan akibat dari pergantian pemerintahan, UNAMID harus tetap menjalankan penarikannya secara berkala. Instabilitas situasi yang sedang terjadi di Sudan mengharuskan UNAMID melakukan penerapan adaptasi pendekatan dan sistem dalam waktu jangka yang pendek mengakibatkan hasilnya tidak maksimal. Oleh karena itu, sebagai salah satu alasan juga mengapa dibentuk misi bantuan politik yang dikenal dengan nama UNITAMS yang berupaya untuk membenahi kekurangan-kekurangan yang terjadi pada saat UNAMID menjalankan tugasnya.

4.2 Gambaran Ruang Kerentanan Pada Masa Pemerintahan Transisi Sudan

Dalam mengungkap bagaimana pentingnya situasi pada saat masa pemerintahan transisi Sudan yang memengaruhi setiap keputusan yang dibuat baik dari pihak komunitas internasional maupun pemerintahan Sudan, Peneliti berusaha untuk memberikan gambaran besar dari sifat ruang kenegaraan Sudan pada saat itu yang dinilai rentan terhadap permasalahan-permasalahan baik internal maupun eksternal. Peneliti menguraikan permasalahan apa saja yang memiliki potensi besar untuk perubahan-perubahan yang terjadi di Sudan dan bagaimana hal tersebut juga memengaruhi keputusan komunitas internasional dalam menerapkan kebijakan untuk bantuan terhadap pemerintahan Sudan.

Jauh sebelum lengsernya pemerintahan Omar Al-Bashir di Sudan, Sudan telah mengalami keadaan negara yang cukup lemah, hal ini dapat terlihat dari kondisi ekonomi, sosial dan krisis kemanusiaan yang terjadi. Serta dengan keluarnya UNAMID dari Sudan, mereka mengalami tingkatan tekanan yang cukup kuat untuk terus membenahi keadaan negara mereka. Selain itu, penyebaran virus COVID-19 sebagai pandemi juga menjadi salah satu tantangan besar yang harus

mereka hadapi pada saat itu. Dalam diskusi yang dilakukan oleh *United States Institute of Peace* bersama dengan Aly Verjee sebagai pakar tamu yang telah memimpin upaya penelitian di beberapa negara seperti Ethiopia, Nigeria, Sierra Leone, Sudan dan lainnya, Manal Taha sebagai antropologis dan pakar analisis konflik untuk negara-negara rentan dan Payton Knopf sebagai penasehat senior untuk *United States Institute of Peace*, memberikan beberapa catatan bahwa kondisi Sudan jauh lebih lemah daripada sebelum Bashir dilengserkan dan COVID-19 memiliki potensi untuk memperburuk keadaan secara eksponensial. Selain itu, ketergantungan Sudan pada ekonomi informal, pengiriman uang, dan pendapatan dari sumber daya ekstraktif seperti minyak membuat Sudan menjadi sangat rentan terhadap perlambatan ekonomi global yang sedang berlangsung (*United States Institute of Peace, 2020*). Timbulnya masa di mana keberlangsungan politik Sudan memiliki kerentanan merupakan hal yang dapat membahayakan Sudan ke depannya, *one thing could lead to another*.

Pada Maret 2020, pemerintah Sudan memberlakukan karantina terhadap penyebaran COVID-19. Hal ini juga termasuk pada menutup perbatasan internasional. Meskipun demikian, dari upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah seperti memperkenalkan *social distancing*, antrean panjang untuk membeli roti masih merupakan hal yang biasa terjadi di Sudan (*Middle East Eye, 2020*). Keadaan ini pastinya yang akan membuat penyaluran bantuan internasional menjadi semakin lambat. Selain masalah kesehatan, permasalahan juga diperburuk dengan pemerintahan transisi yang masih ditakuti oleh masyarakat Sudan meskipun mereka telah berbagi kekuasaan dengan perwakilan sipil, masyarakat masih khawatir jika sewaktu-waktu jenderal militer yang memiliki kekuasaan dalam pemerintahan transisi akan mengambil alih kekuasaan sepenuhnya (*Kleinfeld, A year after al-Bashir's ouster, cash-strapped Sudan too broke for peace, 2020*). Tidak dapat dipungkiri bahwa untuk mencapai suatu perdamaian dan bangkit dari ekonomi yang ingin runtuh memerlukan modal dan keuangan yang banyak, tahapan yang dilalui juga begitu kompleks dan memerlukan waktu. Dengan Pandemi COVID-19 yang mulai masuk ke Sudan, membutuhkan perhatian yang ekstra untuk dapat menangani situasi tersebut. Saat-saat seperti inilah Sudan membutuhkan sekali dukungan

kemanusiaan khususnya dalam bidang kesehatan, dimulai dari tenaga kesehatan, alat-alat medis, vaksin dan sebagainya.

Menghadapi permasalahan situasi kesehatan di Darfur bukanlah merupakan hal yang mudah. Eskalasi konflik yang terjadi menyebabkan meningkatnya permintaan akan layanan kesehatan, namun jumlah fasilitas kesehatannya sangat terbatas. Belum lagi telah terbentuk juga rasa ketidakpercayaan di antara masyarakat Darfur terhadap pemerintahan Sudan atas ketidakmampuannya dalam mengendalikan situasi. Menurut jurnal kesehatan yang ditulis oleh Alanood Mohamed dan lainnya, Sudan memiliki sistem kesehatan yang rapuh dan dinilai dapat memperburuk peningkatan penyakit menular seperti tuberkulosis (TB). Penyebaran TB di Sudan sendiri diperburuk oleh keadaan akibat dari konflik bersenjata yang terjadi, di mana banyak sekali masyarakat yang terpaksa harus menjadi pengungsi. Oleh karena itu, penyebaran COVID-19 sendiri memiliki kemungkinan yang cukup besar akan mengikuti hal serupa (Mohamed, Elhadi, Mohammed, Ekpenyong, & Lucero-Priso III, 2022). UNAMID sendiri telah melakukan upaya dalam melakukan edukasi terhadap masyarakat pada Juni dan Juli 2020 dengan meluncurkan proyek komunikasi risiko COVID-19 yang dapat dikatakan sukses dalam membentuk kembali kesadaran masyarakat terhadap kesehatan khususnya untuk melakukan vaksinasi (UN Peacekeeping, 2020).

Penting bagi UNAMID untuk memperluas cakupannya tidak hanya untuk petinggi-petinggi kunci yang ada di Darfur, namun juga memastikan bahwa bantuan yang diberikan tidak memihak dan menargetkan penerima manfaat yang rentan terlepas dari afiliasi kesukuan dan komunal. Hal ini dikarenakan kemitraan dan kolaborasi secara efektif antara tokoh masyarakat, kelompok pemuda dan perempuan memiliki kunci yang sangat penting dalam mencapai keberhasilan. Zurab Elzarov, sebagai ketua dari *UNAMID's Governance and Community Stabilization Section (GCSS)* memberikan pernyataan bahwa investasi dalam peningkatan kapasitas LSM akan memiliki dampak jangka panjang agar mereka dapat membentuk komunitas yang tangguh, bahkan ketika UNAMID telah angkat kaki dari Sudan (UN Peacekeeping, 2020). Dengan kehadiran representasi masyarakat sipil pada badan pemerintahan transisi Sudan akan membantu UNAMID dalam melancarkan rencananya.

Pemerintahan transisional Sudan dapat dikatakan telah mewarisi beban ekonomi serta sumber daya yang telah disia-siakan oleh pendahulunya, yaitu saat pemerintahan Omar Al-Bashir. Beban ekonomi yang telah dilimpahkan ini membuat pemerintah transisi memiliki ruang gerak yang terbatas sehingga sulit untuk melakukan manuver dalam membangun kembali ekonomi Sudan yang telah rapuh. Pilihan yang cukup sulit memunculkan sebuah dilema ekonomi mengenai prioritas yang harus terlebih dahulu dilakukan. Dilema ini juga membuat perselisihan di antara badan pemerintahan transisi khususnya antara perwakilan politik sipil dengan Menteri Keuangan. Menteri Keuangan melihat subsidi komoditas universal sebagai beban yang menguras sumber daya dan membatasi kemampuan pemerintah untuk mengalihkannya (Khalifa, 2020). Penolakan terhadap subsidi ini sangat diperhatikan oleh pemerintah transisi yang dikarenakan, jika fokusnya tidak beralih terhadap pertumbuhan ekonomi Sudan, masyarakat tetap akan terjebak dalam siklus kemiskinan karena subsidi hanya bersifat memudahkan sementara dan tidak dapat menyudahkan persoalan kemiskinan.

Pemerintah transisi Sudan juga tidak didukung oleh seluruh elemen politik yang terdapat di Sudan, contohnya seperti beberapa organisasi Islam yang memiliki kaitan dengan *National Congress Party* di bawah pimpinan Omar Al-Bashir yang menganggap pemerintahan transisi sebagai sayap kiri dan berusaha untuk menjatuhkan organisasinya. Dengan perselisihan terus menerus yang terjadi di antara pemain politik, kesepakatan pengelolaan pemerintah dalam sektor ekonomi akan sulit tercapai. Hal tersebut akan menyebabkan kinerja yang dilakukan oleh pemerintah transisi menjadi tidak maksimal akibat dari kurangnya konsensus di antara pemain politik yang terlibat. Beberapa pihak juga merasa bahwa kekuatan militer pemerintahan Sudan masih memiliki pengaruh yang cukup besar pada proses transisi ini seperti analisis yang dilakukan oleh Kleinfeld (2020) bahwasannya ketakutan telah terbentung di antara masyarakat yang membuat ketegangan politik cukup tinggi.

Pemerintahan transisi Sudan juga terbebani oleh sanksi yang diberikan oleh Amerika Serikat dan PBB. Pada tahun 1993, Amerika Serikat menunjuk Sudan sebagai Negara Sponsor Terorisme yang mengakibatkan pemutusan hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dan Sudan. Namun, sanksi ekonomi yang telah

diberikan kepada Sudan diangkat pada tahun 2017 (US Department of State, 2022). Keberhasilan pemerintahan transisi juga tergantung kepada bagaimana mereka mengendalikan situasi agar Sudan dapat keluar dari daftar Negara Sponsor Terorisme karena dengan keberadaan Sudan pada daftar tersebut akan membatasi kemampuan ekonomi dalam menerima bantuan sumber daya dan kemanusiaan. Pada tahun 2020, Amerika Serikat akhirnya mengangkat Sudan dari daftar tersebut mengikuti berakhirnya rezim pemerintahan Omar Al-Bashir (BBC, 2020). Meskipun hal ini terdengar dapat memudahkan proses transisi Sudan, pemerintahan transisi masih memiliki banyak pekerjaan yang harus mereka benahi dan dapat dikatakan masih jauh dari kata selesai.

Selain itu, terkait dengan masalah keuangan yang dialami Sudan, salah satu faktornya adalah karena mereka kehilangan Sudan Selatan yang menjadi negara independen pada tahun 2011. Sudan kehilangan sebagian besar kekayaan minyaknya akibat dari kejadian tersebut dan hal ini membawa dampak yang besar terhadap permasalahan keuangan. Menurut Menteri Keuangan Sudan yaitu Ibrahim Elbadawi, Sudan membutuhkan estimasi dana sekitar 5 Miliar Dolar US untuk dapat mempertahankan negaranya dari keruntuhan (Reuters, 2019). Hal lain yang membutuhkan perhatian lebih adalah pemenuhan pembicaraan perdamaian yang terus-menerus diulur dikarenakan permasalahan keuangan seperti di atas. Hal ini berkaitan dengan tuntutan keadilan yang diinginkan oleh para kelompok pemberontak yang telah menuntut semenjak pemerintahan Al-Bashir. Kekhawatiran masyarakat Darfur juga dapat diredam dengan mandat UNITAMS mengenai perlindungan sipil. Mandat perlindungan sipil memiliki pengaruh yang sangat besar di Sudan yang sejalan dengan mandat-mandat lainnya. Tanpa mandat ini, kemungkinan besar akan terjadi demonstrasi lain karena masyarakat Sudan merasa tidak aman di negaranya sendiri.

Namun, kehadiran mandat perlindungan warga sipil tersebut tidak dapat menjamin dengan pasti keamanan warga Darfur. Hal ini dikarenakan, mandat tersebut tidak menyebutkan perlindungan warga sipil secara fisik, melainkan hanya berada pada tingkatan ‘membantu’ dan ‘mendukung’. UNITAMS sendiri merupakan misi politik khusus yang terintegrasi dan bertujuan untuk membantu Sudan dalam proses transisinya. Dapat dikatakan bahwa UNITAMS memiliki

tanggung jawab yang berbeda dengan UNAMID. Volker Perthes sebagai pimpinan dari UNITAMS juga mengatakan bahwa UNITAMS merupakan sebuah misi kecil dengan mandat yang cukup luas dan bahwasannya, orang-orang tidak bisa membandingkan UNITAMS dengan UNAMID (Kleinfeld & Amin, 2021). Dengan modal dan mandat yang tidak dapat mencakup seluruh kebutuhan masyarakat Darfur, UNITAMS akan terus melanjutkan misinya hingga perpanjangan mandat pada tahun 2021.

Pengembangan awal UNITAMS yang sangat berisiko ini juga menuai beberapa kontra termasuk dari pemerintahan transisional dan gerakan masyarakat pro-demokrasi. Pemerintahan transisional Sudan mengancam akan mengusir Volker Perthes sebagai pimpinan dari UNITAMS, mereka menilai bahwa kehadiran UNITAMS berusaha untuk menghancurkan Sudan dan memerangi Islam. Selain itu, kritik juga didapati dari gerakan masyarakat pro-demokrasi yang menilai UNITAMS telah mendukung legitimasi kudeta militer (Sudan In The News, 2022). Dilema ini menghasilkan mekanisme baru yang terdiri dari UNITAMS, Uni Afrika, dan *Intergovernmental Authority in Development (IGAD)*. Mereka membuat dialog sipil-militer yang dipromosikan untuk melakukan mediasi terhadap pihak-pihak tersebut. Namun, meskipun upaya telah dilakukan oleh PBB dalam melakukan mediasi terhadap dua pihak terkait, upaya tersebut tetap menuai kritikan. Mereka memberikan kritikan yang menilai bahwa UN telah gagal dalam memahami kondisi politik dan ekonomi yang ada di Sudan.

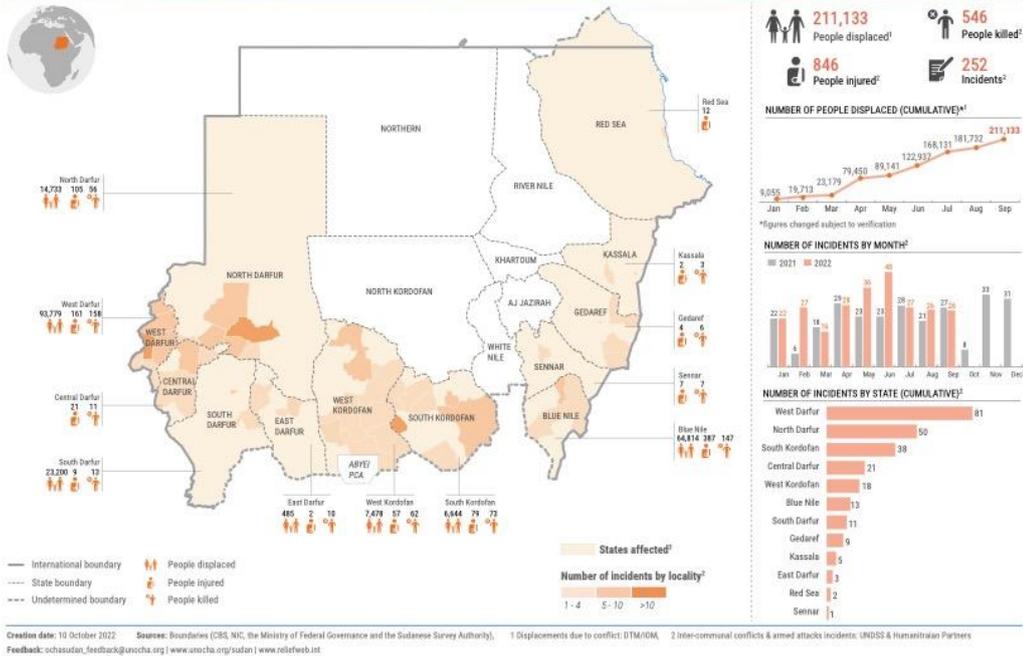
Tidak hanya faktor ekonomi, sosial dan politik, Sudan juga memiliki kerentanan dari dampak terkait iklim. Menurut penelitian yang dilakukan oleh *Think Hazard*, Sudan memiliki potensi terdampak beberapa bahaya geofisika seperti banjir, kelangkaan air, gunung berapi yang memiliki klasifikasi ‘tinggi’ dan beberapa bahaya lain seperti badai debu dan gelombang panas yang ekstrim. Dalam mengatasi permasalahan ini, pada tahun 2018, *United Nations Environment Programme (UNEP)* bersama dengan *European Union (EU)* membentuk proyek percobaan di daerah Wadi El Ku, Darfur Utara, Sudan (UNEP & EU, 2022). Proyek ini memiliki fokus dalam menggunakan kombinasi kegiatan adaptasi perubahan iklim dan pembinaan perdamaian untuk mempromosikan pengelolaan sumber daya alam yang jauh lebih efektif di antara masyarakat Darfur. Kegiatan ini menarik

perhatian peneliti dikarenakan mereka memiliki fokus yang menyorot komunitas lokal untuk ikut berkontribusi dalam penanganan masalah, penilaian risiko dan resolusi konflik. Analisis lebih lanjut terhadap program ini akan dilakukan pada bab berikutnya.

4.3 Meningkatnya Konflik Interkomunal di Darfur

Lengsernya pemerintahan Omar Al-Bashir yang dituruti dengan kenaikan harga pangan serta minyak menjadikan keadaan yang tidak stabil bagi masyarakat Darfur yang mengakibatkan perselisihan atas permasalahan tersebut juga tidak dapat dihindarkan. Kejadian seperti *Khartoum Massacre* dan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat baik terhadap pemerintahan transisi maupun UN, membuka ruang kerentanan bagi Sudan terhadap permasalahan baru. Salah satunya adalah meningkatnya konflik interkomunal. Menurut laporan yang dibuat oleh *Famine Early Warning System Network*, eskalasi peningkatan konflik interkomunal akan terjadi pasca musim hujan atau selama musim panen antara November 2022 dan Januari 2023. Hal ini dikarenakan sebagian besar daerah yang terdampak oleh konflik seperti Darfur, Jebel Marra, Kordofan Selatan, dan lainnya akan tetap mengalami krisis yang diakibatkan oleh panen di bawah rata-rata, ketidakamanan yang masih berlanjut, hilangnya aset akibat bencana alam, harga pangan di atas rata-rata dan berkurangnya akses pada pilihan mata pencaharian dan bantuan kemanusiaan serta akses jalanan yang masih buruk (FEWS Net, 2022).

Gambar 4.3.1 Visualisasi Peningkatan Konflik Antarkomunitas (Januari – September 2022)



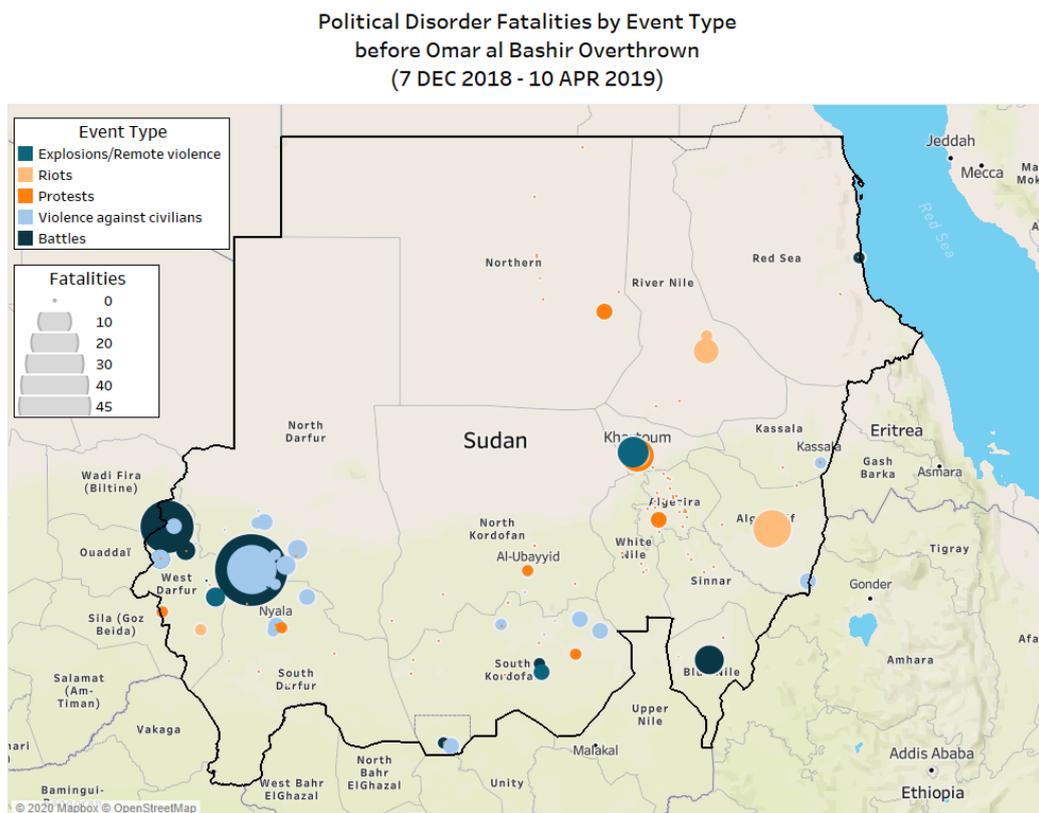
Sumber: (OCHA, 2022)

Berdasarkan visualisasi di atas menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan dalam kekerasan interkomunal yang telah dibandingkan dari tahun 2021. Peningkatan yang sangat signifikan terdapat pada bulan Februari, Mei, dan Juni dan selebihnya masih berada pada angka yang konstan. Darfur Barat menjadi daerah yang memiliki paling banyak konflik diikuti dengan Darfur Utara. Peningkatan ini terjadi akibat dari hasil gagal panen oleh curah hujan yang tidak menentu sehingga menyebabkan petani-petani di sana sulit untuk melakukan cocok tanam. Hal ini mengarah kepada semakin buruknya situasi ketahanan pangan dan keadaan ini juga semakin diperburuk dengan dampak yang diakibatkan dari krisis ekonomi serta inflasi yang tinggi (UNOCHA, 2022). Keadaan di mana sulit untuk mendapatkan pangan akan memberikan percikan terhadap konflik interkomunal yang diikuti oleh meningkatnya permintaan masyarakat Darfur terhadap kebutuhan sehari-hari yang sulit untuk didapatkan.

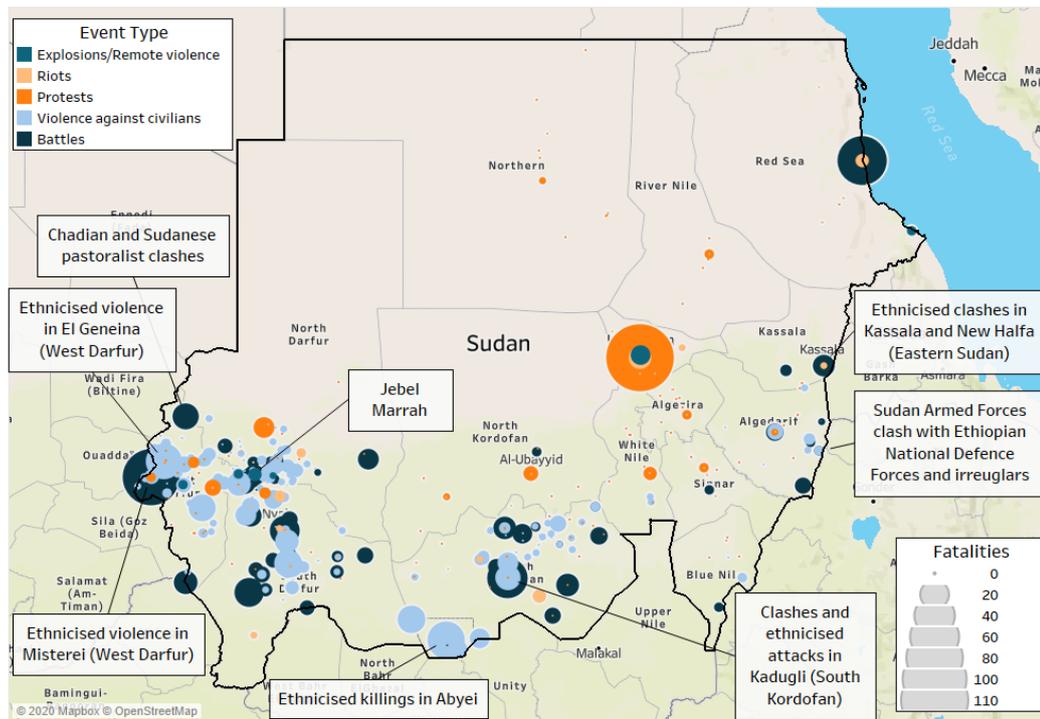
Peningkatan konflik interkomunal yang terjadi di Darfur sendiri memiliki keterkaitan yang cukup erat dengan keadaannya yang rentan dari segala sektor seperti yang telah dijelaskan pada sub-bagian di atas. Namun, faktor utama dari peningkatan konflik interkomunal ini terletak pada kejadian *Khartoum Massacre*

yang terjadi pada Juni 2019. Meskipun Omar Al-Bashir turun dari kekuasaannya, ketidakpercayaan masyarakat Sudan terhadap *Transitional Military Council* (TMC) masih terus berlanjut dikarenakan hubungan TMC yang sangat erat dengan *National Congress Party* (NCP). Dalam dimensi waktu yang cukup pendek, TMC berencana untuk melakukan pemilihan besar dalam jangka waktu 9 bulan. Hal ini mengakibatkan pembatalan perjanjian yang telah dibicarakan dengan kelompok oposisi (Al Jazeera, 2019). Pengadaan pemilihan umum ini dapat dikatakan dilakukan secara tergesa-gesa dan memiliki kesan bahwa TMC memiliki suatu agenda yang tidak memihak kepada kelompok oposisi. Hal ini memunculkan tensi yang cukup kuat di antara pemain politik yang terlibat.

Gambar 4.3.2 Visualisasi Perbandingan Peningkatan Konflik Sebelum dan Sesudah Berakhirnya Pemerintahan Omar Al-Bashir



Political Disorder Fatalities by Event Type
after Omar al Bashir Overthrown
(11 APR 2019 - 1 AUG 2020)



Sumber: (ACLED, 2020)

Menurut laporan misi pencarian fakta yang dilakukan oleh *African Centre for Justice and Peace Studies*, telah muncul pola kekerasan baru yang terjadi setelah lengsernya kepemimpinan Omar Al-Bashir. Kekerasan interkomunal meningkat dua kali lipat pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Setidaknya, dari bulan Juli hingga Desember 2020 telah terjadi 28 konflik interkomunal, sedangkan di tahun 2019 pada periode yang sama telah terjadi setidaknya 15 konflik interkomunal (UNOCHA, 2021). Pola konflik interkomunal ini mengingatkan terhadap pola kekerasan yang terjadi hingga meletusnya pemberontakan Darfur pada tahun 2003. Pola tersebut dapat terlihat dari penyerangan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata “Janjaweed” yang didominasi oleh orang Arab yang melakukan kekerasan terhadap warga sipil serta kekerasan terhadap wanita. Konflik interkomunal ini meliputi 4 daerah di Darfur, yaitu Darfur Barat, Darfur Tengah, Darfur Utara dan Darfur Selatan. Pada beberapa titik, konflik interkomunal diawali oleh insiden kecil dan meningkat menjadi konflik yang lebih besar dengan cepat.

Pada Desember 2019 tepatnya tanggal 29, terjadi konflik yang berawal dari perselisihan antara anggota suku Masalit dengan suku Arab Rezaigat, yang berujung dengan kematian dari suku Arab. Kejadian itu memicu kemarahan orang-orang Rezaigat dan memicu pembalasan pada keesokan harinya. Setidaknya sebanyak 30 orang bersenjata dan beberapa menggunakan seragam RSF telah menyerang sebuah pasar yang terletak di Kamp Kirinding. Penyerangan tersebut menghasilkan penjarahan, penghancuran dan pembakaran serta terbunuhnya beberapa pengungsi (International Federation for Human Rights, 2020). Kejadian ini mengharuskan setidaknya sebanyak 48.000 pengungsi harus dilarikan ke daerah Geneina yang terletak di Darfur Barat. Kejadian ini mendapatkan reaksi dari segelintir masyarakat internasional yang menginginkan pemerintahan transisi menjadikan perang terhadap impunitas sebagai salah satu prioritas utama yang termasuk kepada penyelidikan secara adil dan tidak memihak serta membebaskan pertanggungjawaban kepada pelaku.

Kejadian tersebut memperlihatkan bagaimana pemerintahan masih memiliki bias yang menunjukkan ketidakadilan terhadap masyarakat Darfur. Hal ini didukung oleh argumen dari Brosché (2015) yang menyatakan bahwa konflik komunal yang dapat merambat kepada konflik yang begitu brutal biasanya dikarenakan terdapat beberapa komunitas yang mendapatkan dukungan dari pemerintah kepada komunitas tertentu (Brosché, 2015). Ketika terjadi suatu perselisihan, khususnya mengenai tanah dan segala kelangkaan yang terjadi, keadaan ini dapat menjadi lebih baik dan juga sebaliknya, hal ini tergantung kepada bagaimana karakteristik pemerintahan yang melakukan keberpihakan atau tidak. Ketika pemerintah melakukan keberpihakan terhadap suatu komunitas, akan muncul kesenjangan di antara komunitas-komunitas yang ada. Keadaan juga akan menjadi lebih buruk ketika terjadi kelangkaan sumber daya yang notabenehnya menjadi sumber utama dalam kehidupan sehari-hari sebuah masyarakat.

Peristiwa yang terjadi selanjutnya adalah penyerangan daerah Misterei yang terjadi pada Juli 2020. Kejadian ini melibatkan komunitas Arab dan Masalit yang memiliki perselisihan yang berawal dari pembunuhan dan pencurian hewan ternak. Konflik yang terjadi mencetuskan setidaknya dua demonstrasi damai yang digelar pada 9 Juli dan 17 Juli 2020. Para demonstrator menyuarakan tuntutan bagi

pemerintah daerah untuk keamanan dan keadilan, khususnya perlindungan terhadap para petani dari penyerangan dan perusakan hasil tani mereka. Demonstrasi tersebut berujung kepada kekerasan terhadap beberapa demonstran yang setidaknya melukai 17 orang (Darfur Women Action Group, 2020). Akibat dari demonstrasi ini, komunitas Arab merasa menjadi target ‘diskriminasi’, karena beberapa pemuda Masalit menutup akses bagi komunitas Arab untuk masuk ke dalam kota dan mengakses pasar (African Centre For Justice and Peace Studies, 2021). Lalu, pemerintah melakukan respons melalui Perdana Menteri Abdalla Hamdok dengan mengirimkan beberapa pasukan paramiliter yang di antaranya merupakan pasukan dari RSF.

Penanganan konflik yang dilakukan tersebut menimbulkan beberapa pertanyaan dari komunitas kemanusiaan yang ada di Darfur seperti *Darfur Women Action Group*. Mereka mempermasalahkan bahwasanya entitas seperti RSF tidak dapat melakukan perlindungan terhadap masyarakat sipil ketika mereka sendiri merupakan bagian dari konflik tersebut. Mereka menilai hal tersebut sebagai kegagalan pemerintah dalam mendengarkan seruan masyarakat terhadap konflik yang terjadi (Darfur Women Action Group, 2020). Selain kepastian perlindungan terhadap masyarakat yang harus dilaksanakan pemerintah juga perlu memperhatikan bagaimana mereka akan menekan angka penyebaran COVID-19, melihat keadaan penyebaran COVID-19 yang saat itu sedang terjadi dan konflik berkelanjutan yang terus-menerus terjadi, seakan-akan menjadikan Sudan seperti menghadapi dua pandemi sekaligus. Keinginan masyarakat akan keterlibatan intervensi komunitas internasional juga semakin membesar, khususnya pada hal terkait perlindungan warga Darfur dan bantuan kesehatan.

Konflik yang selanjutnya terjadi pada Kirinding untuk yang kedua kalinya. Pada Januari 2021, komunitas Arab melakukan penyerangan terhadap Kamp Krinding yang digunakan untuk menampung beberapa pengungsi. Konflik antara komunitas Arab dan Masalit ini terus berlanjut sampai pertengahan 2021. Dalam konflik tersebut, terdapat faktor kunci yang mungkin mempengaruhi ketidakpuasan dari komunitas Arab. Beberapa di antaranya merupakan perselisihan atas tanah dan kepemimpinan tradisional. Sebelumnya, kemunculan Hemedti sebagai pemimpin RSF dan memiliki darah keturunan Arab ini memberikan komunitas Arab

keyakinan untuk menegaskan kekuatan mereka selama pemerintahan Omar Al-Bashir masih berjalan. Namun, setelah jatuhnya kepemimpinan Al-Bashir dan dengan adanya *Juba Peace Agreement*, telah muncul ketidakpastian masa depan di antara pemimpin komunitas Arab yang menganggap bahwa perjanjian tersebut merugikan mereka. Hal ini yang mengakari demonstrasi komunitas Arab yang dijudulki sebagai “*sit-in of the Arab Tribes*”.

Gambar 4.3.3 Situasi “*sit-in of the Arab Tribes*” di Al-Geneina



Sumber: (Dabanga Sudan, 2021)

Sit-in of the Arab Tribes diadakan di Al-Geneina pada Januari 2021 dengan permintaan yang berkisar pada keluhan mereka terhadap kekuasaan, tanah dan sumber daya. Salah satu permintaan mereka adalah agar pemerintahan daerah Darfur Barat untuk segera mundur dari jabatannya. Pemimpin daerah yang menjabat pada saat itu merupakan orang keturunan Masalit. Selain itu, permintaan yang lain adalah pembongkaran kamp pengungsi yang ada di Al-Geneina. Demonstrasi ini mendapatkan jawaban dari komite perlawanan yang bertanggung jawab di sana, mereka tidak setuju atas demonstrasi tersebut dikarenakan demonstrasi tersebut dimulai atas nama suku tertentu dan juga dipimpin oleh

sejumlah pendukung rezim Omar Al-Bashir (Dabanga Sudan, 2021). Insiden yang terjadi di Al-Geneina ini menggarisbawahi perlunya upaya berkelanjutan untuk mengatasi penyebab mendasar konflik tersebut, termasuk pada sistem pemerintahan yang inklusif dan adil, penyebaran dan akses sumber daya secara merata dan pentingnya mempromosikan rekonsiliasi dan kohesi sosial di antara komunitas yang terlibat.

Pada proses politik menuju negara demokrasi ini, aktor sipil diwakili dengan pengaturan politik yang berisikan koalisi partai politik dan kelompok masyarakat sipil bernama *Forces of Freedom and Change* (FFC). FFC seharusnya merupakan sebuah wadah yang dapat menampung semua aspirasi masyarakat sipil di Sudan untuk dapat memberikan suaranya dalam proses politik yang terjadi. Namun, dalam perjalanannya, FFC terbagi menjadi dua fraksi. *National Accord Forces* (FFC-NA) yang berisikan anggota pemberontak yang telah menandatangani *Juba Peace Agreement* (JPA) pada tahun 2020 (Dabanga Sudan, 2022). Sedangkan, FFC-CC (*Central Council*) tetap menjadi fraksi utama dan memiliki anggapan bahwa kelompok baru tersebut memiliki ide ‘anti-demokratis’ dan menginginkan kekuatan militer untuk tetap memiliki pengaruh yang kuat dalam pemerintahan Sudan. Hal tersebut menjadi salah satu isu utama yang memecah belah FFC, marginalisasi Darfur dirasakan oleh beberapa kelompok yang merasakan bahwa beberapa orang memprioritaskan kepentingan masing-masing di atas kebutuhan bersama. Perselisihan inilah yang dapat dikatakan menjadi faktor atas gagalnya pembuatan kesepakatan.

Alih-alih mencapai kesepakatan yang dapat memberikan kepastian masa depan keamanan Sudan, Pada tanggal 25 Oktober 2021, telah terjadi kudeta militer oleh militer Sudan (SAF) yang dipimpin oleh Abdel Fattah Al-Burhan yang menyebabkan pemadaman internet untuk beberapa waktu (The Guardian, 2021). Kudeta ini diikuti oleh penangkapan Perdana Menteri Abdalla Hamdok dan beberapa orang dari kabinetnya yang pada saat itu menolak keras terjadinya kudeta militer. Selain itu, perebutan kekuasaan dan pembubaran pemerintah transisi dijustifikasi oleh Jenderal Al-Burhan karena beliau merasa perselisihan yang terjadi antara pihak militer dan sipil telah mengancam keamanan dan stabilitas Sudan. Hal ini mendapatkan perhatian dari komunitas internasional, khususnya dari António

Guterres sebagai Sekretaris Jenderal dari PBB. Beliau mengutuk kudeta militer yang terjadi dan menyegerakan pembebasan para pejabat yang telah ditahan. Selain itu, Gueterres juga menegaskan bahwa harus ada ‘penghormatan penuh terhadap piagam konstitusi untuk melindungi transisi politik yang telah diperjuangkan’ (António Guterres, 2021).

Gambar 4.3.4 Suasana Protes Kudeta Militer di Khartoum Pada 25 Oktober 2021



Sumber: (Benoist, 2021)

Kudeta militer ini mendapatkan reaksi dari Koalisi FFC yang menyerukan pembangkangan sipil dalam menjawab kudeta militer yang terjadi. Hal serupa juga diserukan oleh Perdana Menteri Hamdok yang menginginkan masyarakat Sudan untuk turun ke jalan dan mempertahankan ‘revolusi’ yang telah mereka perjuangkan (Benoist, 2021). Keinginan masyarakat Sudan ini termasuk kepada pembatalan kudeta militer serta restorasi pemerintahan transisi menjadi seperti semula. Dengan melihat keadaan yang menjadi semakin tidak stabil, Uni Afrika menangguhkan keanggotaan Sudan sampai pemerintahan mereka kembali pada otoritas yang dipimpin oleh sipil (Dabanga Sudan, 2021). Penangguhan keanggotaan Sudan dari Uni Afrika ini menimbulkan beberapa implikasi, yang di antaranya adalah Sudan dikecualikan dari partisipasi dalam kegiatan yang

menyangkut dengan Uni Afrika serta dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, penanggulangan ini juga akan berdampak pada hubungan negatif antara Sudan dan negara Afrika lainnya yang dapat membatasi akses dukungan serta sumber daya internasional.

Penanggulangan ini memperlihatkan bagaimana legitimasi pemerintah yang dikuasai oleh militer diragukan, khususnya oleh Uni Afrika dan masyarakat internasional yang lebih luas. Akibat dari kudeta militer ini, kehidupan sosial di Darfur menjadi seperti ‘terjeda’. Seiring dengan berjalannya pembangkangan sipil dan demonstrasi yang berujung pada penutupan dan barikade jalanan dan penutupan banyak dari institusi pemerintahan, bank, toko-toko, dan sekolah (Dabanga Sudan, 2021). Keadaan ini menyebabkan kenaikan harga komoditas sehari-hari yang menyulitkan masyarakat untuk mendapatkan makanan dan sumber daya lainnya. Selain itu, Pada 19 November 2021, terdapat beberapa orang bersenjata yang menyerang kantor dari salah satu NGO yang beroperasi di Darfur Timur yaitu *Médecins Sans Frontières* (MSF) atau yang lebih dikenal dengan *Doctors Without Borders*. Menurut laporan yang dibuat oleh MSF, mereka mengancam serta menganiaya petugas dan mencuri sebuah mobil operasional MSF (Médecins Sans Frontières, 2021). Stabilitas keamanan menjadi sangat buruk ketika keselamatan serta keamanan organisasi kemanusiaan netral telah terancam. Hal ini sangat krusial menilai kehadiran organisasi kemanusiaan di Sudan sangat dibutuhkan oleh masyarakat sipil dan mereka yang telah menjadi korban.

Angka tingkatan konflik interkomunal di Darfur, Sudan yang bertambah setiap tahunnya setelah misi penjagaan perdamaian PBB yaitu UNAMID selesai merupakan hal yang terjadi akibat dari banyaknya faktor yang saling mempengaruhi. Penyebab yang mendasari peningkatan konflik ini adalah perselisihan yang terjadi antara komunitas tertentu dan juga perselisihan antara komponen politik tertentu dengan masyarakat sipil. Dengan perselisihan yang terus-menerus dan tidak membuahkan kesepakatan yang dapat memberikan keuntungan untuk kedua belah pihak, konflik interkomunal akan terus meningkat. Perselisihan yang terjadi juga masih berakar pada persaingan atas tanah, sumber daya alam dan ketegangan antara etnis serta agama. Dengan keadaan politik yang belum pulih pada saat masa transisi pemerintahan Sudan, salah satu cara yang dapat

meredakan konflik interkomunal dengan melakukan implementasi resolusi konflik secara transformatif dan melakukan pembinaan perdamaian dengan melibatkan aktor lokal maupun aktor internasional.